

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai sebuah jalur diplomasi baru dalam menangani isu kemanusiaan internasional, yang ternyata dapat memengaruhi diplomasi kemanusiaan yang dimainkan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu pertama, konsep *non-governmental organizations* yang digunakan untuk menunjukkan bahwa terdapat aktor baru dalam proses hubungan internasional kontemporer selain negara. Konsep ini membantu menjelaskan tujuan dibentuknya ACT dan bagaimana pola hubungannya dengan aktor-aktor lain seperti negara. Kedua, konsep diplomasi multi jalur digunakan untuk menjelaskan bagaimana aktor-aktor di dunia baik itu aktor negara dengan non-negara, maupun sesama aktor non-negara, dapat bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dalam hubungan internasional. Diplomasi multi jalur dibagi menjadi sembilan *tracks* berdasarkan aktornya. Para aktor non-tradisional sendiri lahir karena munculnya isu-isu baru dalam studi Hubungan Internasional kontemporer, salah satunya adalah isu kemanusiaan yang termasuk dalam golongan isu *low politics*, yang juga menjadi alasan terbentuknya ACT sebagai sebuah lembaga kemanusiaan global.

ACT muncul sebagai lembaga kemanusiaan lokal yang pada akhirnya bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan global karena melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin memburuk, baik itu yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Dari bencana alam hingga konflik seperti perang yang pada akhirnya menyebabkan krisis

kemanusiaan, khususnya seperti yang terjadi di Suriah, Palestina, Myanmar, Yaman, dan Somalia. Tentu saja, permasalahan ini mengundang perhatian besar masyarakat internasional untuk segera bertindak.

Indonesia sendiri pada dasarnya merupakan salah satu negara yang *concern* pada masalah kemanusiaan global. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia menjadi negara yang tidak pernah absen dalam menangani isu kemanusiaan, seperti pada krisis di Palestina. Sebagai aktor tradisional, peran pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas melakukan dialog ataupun negosiasi dengan negara yang bermasalah saja, namun juga menyuarakan kepeduliannya melalui berbagai forum internasional untuk menyadarkan dan mengajak negara-negara lain dalam mencari solusi terhadap permasalahan kemanusiaan di dunia.

Walaupun sudah terbilang aktif dalam penanganan masalah kemanusiaan global, ternyata masih ada keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Seperti adanya peran ganda yang diemban Indonesia yaitu sebagai penerima dan pemberi donor. Lalu, keanggotaan Indonesia di ASEAN yang memiliki prinsip non-intervensi terhadap permasalahan domestik sesama negara anggota. Kemudian, dalam permasalahan pengungsi, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu, adanya kerumitan dalam birokrasi dan keterbatasan anggaran pemerintah untuk dialokasikan pada bantuan kemanusiaan global juga membuat pergerakan pemerintah Indonesia tidak fleksibel.

Beberapa keterbatasan pemerintah tersebut kemudian menjadikan ACT sebagai jalur alternatif dan pelengkap dalam menangani isu kemanusiaan global. Melalui keterlibatan para profesional dan aktivis di dalamnya, ACT ternyata mampu berperan sebagaimana peran pemerintah dalam melakukan diplomasi kemanusiaan. ACT bahkan bisa bergerak dengan

lebih cepat daripada pemerintah itu sendiri. Seperti pada penyaluran bantuan ke Myanmar, ACT menggunakan jalur khusus yang diperolehnya melalui kemitraan dengan NGO lain. Pergerakan ACT juga tidak dibatasi oleh aturan seperti prinsip non-intervensi ASEAN, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam menyalurkan bantuannya. Kemitraan yang dilakukan ACT bersama NGO lokal dan pemerintah di dunia internasional kemudian mencerminkan bahwa ACT telah melakukan diplomasi kemanusiaan berdasarkan diplomasi multi jalur *track two*. Selain penyaluran bantuan, ACT juga melakukan berbagai upaya melalui program-programnya untuk meningkatkan jiwa kemanusiaan dan kepedulian masyarakat internasional, seperti melalui aksi solidaritas dan kampanye di media sosial. Meskipun ACT bukan aktor yang dikategorikan sebagai media seperti *track nine* pada diplomasi multi jalur, namun penggunaan media komunikasi yang aktif oleh ACT mampu menghasilkan partisipasi masyarakat yang massif. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah para pendonor setiap harinya di laman web ACT.

Berbagai aksi ACT tersebut ternyata pada akhirnya juga mampu memengaruhi dan menginspirasi pemerintah Indonesia untuk bergerak lebih jauh dalam mengangai isu kemanusiaan global. Seperti dengan dibentuknya aliansi kemanusiaan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang mengajak beberapa lembaga kemanusiaan di Indonesia. Kerja sama yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa mereka mengapresiasi karya yang telah dibuat oleh ACT dan juga lembaga kemanusiaan lain sehingga pemerintah merasa perlu untuk melakukan kerja sama. Selain itu, saat ini pemerintah juga sedang dalam proses membuat rancangan peraturan presiden yang nantinya akan mengatur tentang sistem bantuan kemanusiaan ke luar negeri beserta badannya yang sementara ini dinamakan Indonesian Aid dengan dana yang dialokasikan dari APBN tahun 2018 sebesar 1 triliun rupiah. Rancangan peraturan itu sendiri dibuat karena selama ini Indonesia memang belum memiliki aturan

khusus mengenai pemberian bantuan luar negeri dalam bentuk barang. Selama ini juga, ketika ACT memberikan bantuan seperti beras ke negara-negara lain, mereka mengirimkannya dengan menggunakan izin ekspor sehingga ada biaya ekspor yang ACT keluhkan, padahal tujuannya adalah untuk bantuan kemanusiaan.

Indonesia juga banyak diuntungkan dengan kehadiran ACT, seperti ketika pemerintah Indonesia belum mengalokasikan dana khusus bantuan kemanusiaan sehingga berdampak pada keterbatasan dana, ACT pun mengambil peran dalam membantu penggalangan dana. Terlebih, bisa dikatakan bahwa masyarakat jauh lebih percaya pada lembaga seperti ACT daripada pemerintah karena adanya transparansi dana. Hal tersebut kemudian juga akan berpengaruh terhadap membantu keberhasilan politik luar negeri Indonesia khususnya dalam diplomasi kemanusiaan. Terlebih, citra Indonesia akan meningkat di mata internasional.